

---

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKIP)

---

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LARANTUKA 2025

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan perkenaan-Nya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, strategi dan program serta menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya disampaikan kesemua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sepenuh hati dalam penyusunan Laporan Kinerja.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa diharapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Semoga LKIP ini bermanfaat khususnya bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Januari 2025

Mengetahui  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Flores Timur,



**Verdinandus F.A Bolen, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197107132000121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI .....ii

DAFTAR TABEL ..... iii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.3 Susunan Organisasi ..... 5

1.4 Sumber Daya Manusia..... 6

1.5 Isu Strategis ..... 7

1.6 Dasar Hukum..... 10

BAB II ..... 13

PERENCANAAN KINERJA ..... 13

3.1 Pengukuran Kinerja ..... 27

3.2 Capaian Kinerja Organisasi..... 29

3.3 Realisasi Anggaran ..... 32

4.1 Kesimpulan ..... 41

4.2 Saran ..... 42

## DAFTAR TABEL

|                                                                                          |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tabel 1. 1 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....                       | 6                                   |
| Tabel 1. 2 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon.....                          | 6                                   |
| Tabel 1. 3 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....             | 7                                   |
| Tabel 1. 4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Sub Unit .....                       | 7                                   |
| Tabel 2. 1 Penetapan Indicator Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja.....                    | 14                                  |
| Tabel 2. 2 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....                                     | 15                                  |
| Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Indicator Sasaran ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Penatausahaan.....                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah TA 2024...                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati Flores Timur. Penyusunan LKIP merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP memberikan gambaran tentang capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran dalam rangka pencapaian sasaran/target kinerja. Selain itu LKIP tahun 2024 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKIP BKAD tahun 2024 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BKAD pada penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Menginformasikan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Flores Timur.

## **1.2 Pembentukan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan penataan perangkat daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan.

Sebagai penyelenggara urusan penunjang keuangan, berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset dengan fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perencanaan program dan kegiatan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- f. Pengelolaan administrasi badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. Melaksanakan fungsi BUD;
  - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang melaksanakan fungsinya selaku BUD, dengan kewenangan :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-SKPD;
  - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. Menetapkan SPD (Surat Pencairan Dana);
  - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
  - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah



### **1.3 Susunan Organisasi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yang membawahi:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
  - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
  - 3) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah III
4. Bidang Perbendaharaan Daerah, yang membawahi :
  - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji;
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan Non Gaji;
  - 3) Sub Bidang Penatausahaan Pertanggungjawaban;
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang membawahi:
  - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi I;
  - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi II; dan
  - 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi III
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahi :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan;

- 2) Sub Bidang Pengamanan; dan
- 3) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan

#### 1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam tahun 2024 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 51 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang, Tenaga PPPK 9 orang dan tenaga honorer sebanyak 12 orang, yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

| NO    | GOLONGAN     | JUMLAH (ORANG)                                   |
|-------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1     | IV/b         | 1 orang                                          |
| 2     | IV/a         | 4 orang                                          |
| 3     | III/d        | 8 orang                                          |
| 4     | III/c        | 4 orang                                          |
| 5     | III/b        | 1 orang                                          |
| 6     | III/a        | 5 Orang                                          |
| 7     | XI           | 9 Orang                                          |
| 8     | II/d         | 2 Orang                                          |
| 9     | II/c         | 2 Orang                                          |
| 10    | II/b         | 2 Orang                                          |
| Total |              | 38 Orang                                         |
| 11    | Tenaga Honor | 12 termasuk penjaga malam dan tenaga kebersihan. |

**Tabel 1. 2 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon**

| NO | ESELON | JUMLAH (ORANG) |
|----|--------|----------------|
| 1  | II.b   | 1 orang        |
| 2  | III.a  | 1 orang        |
| 3  | III.b  | 4 orang        |
| 4  | IV.a   | 11 orang       |

**Tabel 1. 3 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan****1) Aparatur Sipil Negara :**

| NO           | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG)  |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 1            | S2                 | 1 orang         |
| 2            | S1                 | 22 orang        |
| 3            | Diploma III        | 5 orang         |
| 4            | SLTA               | 10 orang        |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>38 orang</b> |

**2) Pegawai Kontrak :**

| NO           | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG)  |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 1            | S1                 | 4 orang         |
| 2            | SLTA               | 9 orang         |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>12 orang</b> |

**Tabel 1. 4 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Sub Unit**

| No.          | SUB UNIT                                       | JUMLAH (ORANG)  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1            | Sekretariat                                    | 13 orang        |
| 2            | Bidang Perencanaan Anggaran Daerah             | 7 orang         |
| 3            | Bidang Perbendaharaan Daerah                   | 16 orang        |
| 4            | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 4 orang         |
| 5            | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah         | 10 orang        |
| <b>TOTAL</b> |                                                | <b>50 orang</b> |

**1.5 Isu Strategis**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan

pengelolaan keuangan dan aset terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BKAD adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah:
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dengan catatan, dimana masih ditemukan penjelasan antara lain tentang pengelolaan aset daerah yaitu adanya selisih nilai aset hasil inventarisasi, aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang jelas dan lengkap.

Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat. Selain itu pula pencatatan dan pengakuan atas Dana BOS belum sepenuhnya memadai.

3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Langkah – langkah yang telah dilaksanakan yakni :

1. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan

aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
  - b. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
  - c. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD
2. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang ada dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran.

Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD melalui Rapat Evaluasi tiap triwulan yang dilaksanakan bersama dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur untuk mengevaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD.

## **1.6 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah Kab Flores Timur Tahun 2023-2026.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Flores Timur selaku Kepala Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis maupun indikator kinerja yang disertai dengan target yang harus dicapai. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Penetapan Indicator Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja**

| No | Sasaran                                           | Indikator                                | Target |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah | 100%   |

| Sasaran                                           | Indikator                                | Anggaran        |                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                   |                                          | Sebelum         | Sesudah         |
| Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah | 285.854.791.344 | 294.204.843.650 |

Dalam mendukung indicator sasaran tersebut maka BKD melaksanakan berbagai Program Kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                 | TARGET SEBELUM PERUBAHAN | TARGET SETELAH PERUBAHAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Terwujudnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran yang Memadai dan Berkualitas | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                             | 4 Dokumen                | 4 Dokumen                |
|    |                                                                                | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                        | 4 Dokumen                | 4 Dokumen                |
|    |                                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ( Laporan) | 10 Laporan               | 10 Laporan               |
|    |                                                                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                        | 3 Laporan                | 3 Laporan                |
|    |                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                   | 490 Orang/Bulan          | 35 Orang/Bulan           |
|    |                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                                                                    | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                |
|    |                                                                                | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi                                                                                                 | 36 Laporan               | 36 Laporan               |
|    |                                                                                | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                        | 2 Laporan                | 2 Laporan                |
|    |                                                                                | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai(Dokumen)                                                                                                        | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                |
|    |                                                                                | Jumlah Orang yang mengikuti sosialisai peraturan perundang-undangan                                                                                                               | 5 Orang                  | 5 Orang                  |
|    |                                                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (paket)                                                                                        | 5 Paket                  | 5 Paket                  |
|    |                                                                                | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)                                                                                                            | 2 Paket                  | 2 Paket                  |
|    |                                                                                | Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga (Paket)                                                                                                                                       | 2 Paket                  | 2 Paket                  |

|   |                                       |                                                                                                                  |            |            |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|   |                                       | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)                                                       | 2 Paket    | 2 Paket    |
|   |                                       | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)                                                | 2 Paket    | 2 Paket    |
|   |                                       | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Dokumen)                           | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|   |                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                                                | 2 Laporan  | 2 Laporan  |
|   |                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                    | 2 Laporan  | 2 Laporan  |
|   |                                       | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)                                                          | 12 Laporan | 12 Laporan |
| 2 | Peningkatan Kualitas Akses Pelayanan  | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (laporan)                 | 12 Laporan | 12 Laporan |
|   |                                       | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)                                   | 12 Laporan | 12 Laporan |
|   |                                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)    | 31 Unit    | 31 Unit    |
|   |                                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)                                                        | 1 Unit     | 1 Unit     |
|   |                                       | Jumlah gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)                                 | 1 Unit     | 1 Unit     |
|   |                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)            | 1 Unit     | 1 Unit     |
|   |                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit) | 2 Unit     | 2 Unit     |
| 3 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun                                                                         | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |

|  |  |                                                                                                                                                                 |            |            |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  |  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun                                                                                                    | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi                                                                                                                               | 50 Dokumen | 50 Dokumen |
|  |  | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi                                                                                                                     | 50 Dokumen | 50 Dokumen |
|  |  | Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi                                                                                                                               | 50 Dokumen | 50 Dokumen |
|  |  | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi                                                                                                                     | 50 Dokumen | 50 Dokumen |
|  |  | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD                                                                        | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD                                                    | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                         | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                 | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                             | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                                 | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kab/kota                                                                                   | 50 Orang   | 50 Orang   |
|  |  | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah                                                                                                      | 12 Dokumen | 12 Dokumen |
|  |  | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penertiban anggaran kas dan SPD                                                                                           | 50 Dokumen | 50 Dokumen |
|  |  | Jumlah dokumen hasil penatausahaan pembiayaan daerah                                                                                                            | 2 Dokumen  | 2 Dokumen  |
|  |  | Jumlah dokumen hasil koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya | 19 Dokumen | 19 Dokumen |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  | Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
|  |  | Jumlah lporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetorann Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 3 Laporan | 3 Laporan |
|  |  | Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimlisasi kas                                                                                                                                                                                                   | 5 Dokumen | 5 Dokumen |
|  |  | Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
|  |  | Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
|  |  | Jumlah orang yang mengikuti prmbinaan pentausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Orang  | 50 Orang  |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Laporan | 3 Laporan |

|  |  |                                                                                                                                                                                                          |           |           |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     | 4 Dokumen | 4 Dokumen |
|  |  | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | 4 Laporan | 4 Laporan |
|  |  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 4 Laporan | 4 Laporan |
|  |  | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
|  |  | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                 | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | 2 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                | 1 Laporan | 1 Laporan |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                               | 1 Laporan | 1 Laporan |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | 1 Laporan | 1 Laporan |

|  |  |                                                                                                                              |           |           |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah1                | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                             | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
|  |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | 2 Laporan | 2 Laporan |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 2 Laporan | 2 Laporan |
|  |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD2                                                                          | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | 2 Laporan | 2 Laporan |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 2 Laporan | 2 Laporan |
|  |  | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
|  |  | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 2 Laporan | 2 Laporan |
|  |  | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 2 Laporan | 2 Laporan |
|  |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 4 Orang   | 4 Orang   |



| NO. | PROGRAM                                                                                | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                          | ANGGARAN<br>SEBELUM<br>PERUBAHAN | ANGGARAN<br>SETELAH<br>PERUBAHAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                                                                                      | 3                                                                                              | 4                                | 5                                |
|     | <b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>                                                  |                                                                                                |                                  |                                  |
|     | <b>UNSUR<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                                 |                                                                                                |                                  |                                  |
| I   | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                                                |                                  |                                  |
|     |                                                                                        | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b>            |                                  |                                  |
|     |                                                                                        | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | 14.939.280,00                    | 14.939.280,00                    |
|     |                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                  | 9.934.500,00                     | 9.934.500,00                     |
|     |                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | 9.998.100,00                     | 20.998.100,00                    |
|     |                                                                                        | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                           | 14.999.810,00                    | 20.499.810,00                    |
|     |                                                                                        | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                              |                                  |                                  |
|     |                                                                                        | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | 25.651.023.734,00                | 23.951.598.317,00                |
|     |                                                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan<br>dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | 89.032.370,00                    | 89.032.370,00                    |
|     |                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD       | 14.999.055,00                    | 23.279.055,00                    |
|     |                                                                                        | <b>Administrasi Barang Milik<br/>Daerah pada Perangkat<br/>Daerah</b>                          |                                  |                                  |
|     |                                                                                        | Penyusunan Perencanaan<br>Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah SKPD                                | 9.999.985,00                     | 17.049.985,00                    |
|     |                                                                                        | Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                        | 9.993.000,00                     | 22.918.000,00                    |
|     |                                                                                        | <b>Administrasi Kepegawaian<br/>Perangkat Daerah</b>                                           |                                  |                                  |
|     |                                                                                        | Monitoring, Evaluasi, dan<br>Penilaian Kinerja Pegawai                                         | 9.999.460,00                     | 22.999.460,00                    |

|  |  |                                                                                                                 |                |                |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                   | 25.000.000,00  | 25.000.000,00  |
|  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 68.080.125,00  | 40.710.125,00  |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 24.997.186,00  | 132.821.686,00 |
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       |                |                |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 7.495.426,00   | 7.495.426,00   |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 19.998.125,00  | 48.498.125,00  |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 49.998.628,00  | 86.124.551,00  |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 54.998.939,00  | 74.998.919,00  |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 3.900.000,00   | 3.900.000,00   |
|  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 25.000.000,00  | 55.000.000,00  |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 59.990.000,00  | 185.720.000,00 |
|  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                |                |
|  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                 | -              | -              |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 14.999.760,00  | 33.299.760,00  |
|  |  | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                     |                | -              |
|  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                | -              |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                | -              |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 2.499.500,00   | 2.993.000,00   |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 159.594.000,00 | 159.594.000,00 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 248.400.000,00 | 248.400.000,00 |
|  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                |                |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 144.998.165,00 | 159.998.165,00 |

|    |                                            |                                                                                                                                 |                  |                  |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|    |                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | 10.000.000,00    | 13.150.000,00    |
|    |                                            | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                                  |                  | -                |
|    |                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | 7.851.251,00     | 7.851.251,00     |
|    |                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 4.950.000,00     | 9.750.000,00     |
|    |                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 14.999.830,00    | 70.499.830,00    |
|    |                                            | <b>Keuangan</b>                                                                                                                 |                  |                  |
| II | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> |                                                                                                                                 |                  |                  |
|    |                                            | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                        |                  |                  |
|    |                                            | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | 300.189.150,00   | 293.489.150,00   |
|    |                                            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | 310.530.000,00   | 276.610.000,00   |
|    |                                            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | 39.999.960,00    | 44.999.960,00    |
|    |                                            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | 39.894.960,00    | 44.894.960,00    |
|    |                                            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | 39.999.850,00    | 44.999.850,00    |
|    |                                            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | 39.999.720,00    | 44.999.720,00    |
|    |                                            | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 1.503.771.390,00 | 1.282.921.390,00 |
|    |                                            | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 638.274.930,00   | 635.174.930,00   |
|    |                                            | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | 254.449.605,00   | 287.549.605,00   |
|    |                                            | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | 39.898.500,00    | 39.898.500,00    |
|    |                                            | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | 99.998.140,00    | 99.998.140,00    |
|    |                                            | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | 39.999.970,00    | 39.999.970,00    |

|  |  |                                                                                                                                                                                             |                |                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  |  | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 49.999.990,00  | 49.999.990,00  |
|  |  | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                     |                |                |
|  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                       | 199.999.878,00 | 192.207.128,00 |
|  |  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     | 89.999.814,00  | 89.999.814,00  |
|  |  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                             | 29.999.715,00  | 29.999.715,00  |
|  |  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                  | 39.999.822,00  | 76.299.822,00  |
|  |  | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 130.000.000,00 | 167.290.000,00 |
|  |  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                     | 24.999.760,00  | 24.999.760,00  |
|  |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                          | 99.999.350,00  | 82.659.350,00  |
|  |  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                               | 24.999.672,00  | 26.499.672,00  |
|  |  | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                  | 39.999.990,00  | 39.999.990,00  |
|  |  | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                   |                |                |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  |  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                      | 39.966.000,00      | 39.966.000,00      |
|  |  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | 179.986.860,00     | 203.486.860,00     |
|  |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | 69.999.655,00      | 69.999.655,00      |
|  |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 79.999.780,00      | 79.999.780,00      |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 490.399.845,00     | 600.900.145,00     |
|  |  | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        | 99.999.815,00      | 99.999.815,00      |
|  |  | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                             | 114.999.820,00     | 114.999.820,00     |
|  |  | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | 29.999.910,00      | 29.999.910,00      |
|  |  | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | 30.000.300,00      | 30.000.300,00      |
|  |  | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                              |                    |                    |
|  |  | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | 255.199.707.432,00 | 255.879.125.932,00 |
|  |  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 1.524.999.869,00   | 2.231.249.869,00   |
|  |  | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | 1.600.884.400,00   | 1.600.884.400,00   |
|  |  | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                                                         |                    |                    |

|     |                                                |                                                                                                         |                |                |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | 549.600.000,00 | 351.600.000,00 |
| III | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b> | <b>Persentase Penatausahaan Aset</b>                                                                    |                |                |
|     |                                                | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                  |                |                |
|     |                                                | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 64.999.990,00  | 64.999.580,00  |
|     |                                                | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | 74.999.589,00  | 74.999.589,00  |
|     |                                                | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | 59.999.867,00  | 17.049.985,00  |
|     |                                                | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 24.999.680,00  | 24.999.680,00  |
|     |                                                | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 29.999.770,00  | 87.999.490,00  |
|     |                                                | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 49.999.100,00  | 49.999.100,00  |
|     |                                                | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 149.999.774,00 | 169.992.690,00 |
|     |                                                | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 49.999.750,00  | 107.099.270,00 |
|     |                                                | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 29.999.810,00  | 29.999.810,00  |
|     |                                                | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 69.999.720,00  | 69.999.720,00  |
|     |                                                | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 39.999.740,00  | 39.999.740,00  |
|     |                                                | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 49.999.980,00  | 49.999.980,00  |
|     |                                                | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 19.997.130,00  | 44.996.600,00  |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran Pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) SKPD yang merupakan tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tolak ukur kinerja kebijakan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur haruslah didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Dan Aset Daerah dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Adapun untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja dimaksud,

digunakan instrument standart pengukuran ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu :

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 91-100 %                         | Sangat Tinggi                        |
| 2  | 76-90 %                          | Tinggi                               |
| 3  | 66-75 %                          | Sedang                               |
| 4  | 51-65%                           | Rendah                               |
| 5  | ≤ 50 %                           | Sangat Rendah                        |

Standar pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Flores Timur

Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.



### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir yaitu Tahun 2024, 2023 dan 2022. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Indikator sasaran BKAD Dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Indicator Sasaran**

| No | Sasaran                                           | Indikator                                | Target | Realisasi | Capaian % |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah | 100%   | 94,44%    | 94,44%    |

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dikategorikan Sangat Tinggi karena mencapai 94,44%.

Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur maka Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 secara keseluruhan semua program kegiatan yang direncanakan dalam terlaksana dengan baik untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Revisi Perjanjian Kinerja. Capaian indikator sasaran “ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase penatausahaan keuangan daerah mencapai 94.44% (sangat tinggi). Dalam hal ini Badan keuangan dan Aset Daerah menjalani tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan terdapat permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang bisa melekat berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja.

- Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Badan Keuangan dan Aset Daerah mengalami Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan masih adanya cacatan, dimana masih ditemukan penjelasan mengenai pengelolaan aset daerah. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD.

- Strategis/Solusi

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan keuangan. Terwujudnya tertib administrasi dalam tata kelola aset daerah dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah dapat disajikan dengan akurat. Diharapkan OPD konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang ada dalam DPA OPD sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi diakhir tahun anggaran.

- Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia untuk mengikuti atau melakukan pemdampingan dalam kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan serta teknologi. Meningkatkan komitmen kepala selaku pengguna anggaran atau pengguna barang dan jasa dalam mengelola keuangan daerah secara tertib administrasi sesuai aturan yang berlaku. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD serta meningkatkan koordinasi melalui rapat evaluasi.

Perbandingan realisasi penatausahaan keuangan daerah (%) tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Penatausahaan Keuangan Daerah**

| No | Indikator Sasaran                        | Realisasi |        |        |
|----|------------------------------------------|-----------|--------|--------|
|    |                                          | 2022      | 2023   | 2024   |
| 1  | Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah | 97,99%    | 99,85% | 91,16% |

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, artinya dalam pelaksanaan tata kelola keuangan lebih disiplin dan teliti lagi dalam penyerapan anggaran. Sedangkan di tahun 2023 persentasenya menurun karena tahun 2024 masih dalam proses perhitungan dan pemeriksaan BPK RI.

### 3.3 Realisasi Anggaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur di Tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan memiliki total pagu anggaran sebesar Rp. 294.784.367.713,00. Realisasi anggaran sampai dengan tutup buku 31 Desember 2024 sebesar Rp 288.538.601.145. Adapun perinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah TA 2024**

| NO       | Uraian                            | Anggaran                  | Realisasi                 | %            |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|          | <b>Belanja Daerah</b>             | <b>294.784.367.713,00</b> | <b>288.538.601.145,00</b> | <b>97,88</b> |
| <b>1</b> | <b>Belanja Operasi</b>            | <b>31.800.382.473,00</b>  | <b>26.730.463.617,00</b>  | <b>84,06</b> |
|          | Belanja Pegawai                   | 20.206.923.343,00         | 17.679.277.363,00         | 87,49        |
|          | Belanja Barang dan Jasa           | 11.593.459.130,00         | 9.051.186.254,00          | 78,07        |
| <b>2</b> | <b>Belanja Modal</b>              | <b>55.092.500,00</b>      | <b>51.813.400,00</b>      | <b>94,05</b> |
|          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.092.500,00             | 51.813.400,00             | 94,05        |
| <b>3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>      | <b>5.534.950.980,00</b>   | <b>4.744.098.216,00</b>   | <b>85,71</b> |
|          | Belanja Tidak Terduga             | 5.534.950.980,00          | 4.744.098.216,00          | 85,71        |
| <b>4</b> | <b>Belanja Transfer</b>           | <b>257.393.941.760,00</b> | <b>257.012.225.912,00</b> | <b>99,85</b> |
|          | Belanja Bagi Hasil                | 1.578.000.000,00          | 1.397.184.152,00          | 88,54        |
|          | Belanja Bantuan Keuangan          | 255.815.941.760,00        | 255.615.041.760,00        | 99,92        |

Sumber data: Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (sebelum Audit BPK RI)

Belanja tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2024 adalah realisasi sebesar 97,88 %.

Realisasi anggaran program kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

**Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun 2024**

| NO. | PROGRAM                                                                                | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                             | PAGU ANGGARAN     | REALISASI         | %     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 1   | 2                                                                                      | 3                                                                                                 | 4                 | 5                 | 6     |
| I   | <b>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                                                   |                   |                   |       |
|     |                                                                                        | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>               | 66.371.690,00     | 62.328.875,00     | 93,9  |
|     |                                                                                        | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                             | 14.939.280,00     | 13.992.615,00     | 93,66 |
|     |                                                                                        | Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD                                                  | 9.934.500,00      | 9.904.020,00      | 99,69 |
|     |                                                                                        | Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | 20.998.100,00     | 19.385.000,00     | 92,31 |
|     |                                                                                        | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                              | 20.499.810,00     | 19.047.240,00     | 92,91 |
|     |                                                                                        | <b>Administrasi Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                                                 | 24.063.909.742,00 | 20.456.549.962,00 | 85,00 |

|  |  |                                                                                 |                   |                   |       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 23.951.598.317,00 | 20.349.638.462,00 | 84,96 |
|  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan                                                   | 89.032.370,00     | 83.908.180,00     | 94,24 |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 23.279.055,00     | 23.003.320,00     | 98,81 |
|  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | 39.967.985,00     | 38.654.282,00     | 96,71 |
|  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 17.049.985,00     | 16.639.282,00     | 97,59 |
|  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 22.918.000,00     | 22.015.000,00     | 96,05 |
|  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | 221.531.271,00    | 49.645.800,00     | 22,41 |
|  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 22.999.460,00     | 21.815.000,00     | 94,85 |
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | 25.000.000,00     | -                 | 0     |
|  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | 40.710.125,00     | 26.430.800,00     | 64,92 |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | 132.821.686,00    | 1.400.000,00      | 1,05  |
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | 461.737.021,00    | 427.091.410,00    | 92,49 |

|  |  |                                                                              |                |                |       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi                                                | 7.495.426,00   | 6.905.000,00   | 92,12 |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 48.498.125,00  | 48.152.576,00  | 99,28 |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | 86.124.551,00  | 82.734.658,00  | 96,06 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 74.998.919,00  | 74.156.278,00  | 98,87 |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 3.900.000,00   | 1.800.000,00   | 46,15 |
|  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | 55.000.000,00  | 54.580.625,00  | 99,23 |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 185.720.000,00 | 158.762.273,00 | 85,48 |
|  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | 444.286.760,00 | 350.963.452,00 | 78,99 |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 33.299.760,00  | 30.011.300,00  | 90,12 |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 2.993.000,00   | 2.265.000,00   | 75,67 |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 159.594.000,00 | 132.387.152,00 | 82,95 |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 248.400.000,00 | 186.300.000,00 | 75,00 |
|  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | 261.249.246,00 | 213.379.472,00 | 81,67 |



|    |                                            |                                                                                                                 |                  |                  |       |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|    |                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 159.998.165,00   | 119.061.144,00   | 74,41 |
|    |                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.150.000,00    | 8.075.000,00     | 61,4  |
|    |                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 7.851.251,00     | 7.779.000,00     | 99,07 |
|    |                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 9.750.000,00     | 8.250.000,00     | 85,61 |
|    |                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 70.499.830,00    | 70.214.328,00    | 99,59 |
|    |                                            | <b>Keuangan</b>                                                                                                 |                  |                  |       |
| II | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> |                                                                                                                 |                  |                  |       |
|    |                                            | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                        | 3.185.536.165,00 | 2.317.094.865,00 | 72,73 |
|    |                                            | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                          | 293.489.150,00   | 238.357.072,00   | 81,21 |
|    |                                            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                      | 276.610.000,00   | 173.891.135,00   | 62,86 |
|    |                                            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                  | 44.999.960,00    | 18.660.222,00    | 41,46 |

|  |  |                                                                                                                                 |                  |                |       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|
|  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | 44.894.960,00    | 40.955.072,00  | 91,22 |
|  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | 44.999.850,00    | 43.327.430,00  | 96,28 |
|  |  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | 44.999.720,00    | 18.131.464,00  | 40,29 |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 1.282.921.390,00 | 926.607.780,00 | 72,22 |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 635.174.930,00   | 510.929.511,00 | 90,43 |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | 287.549.605,00   | 183.657.395,00 | 63,86 |
|  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      | 39.898.500,00    | 33.030.500,00  | 82,78 |
|  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | 99.998.140,00    | 92.915.500,00  | 92,91 |
|  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | 39.999.970,00    | 27.814.484,00  | 69,53 |
|  |  | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                             | 49.999.990,00    | 8.817.300,00   | 17,63 |
|  |  | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                         | 759.955.251,00   | 727.859.300,00 | 95,77 |

|  |  |                                                                                                                                                                                             |                |                |       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|  |  | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                       | 192.207.128,00 | 190.890.342,00 | 99,31 |
|  |  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                     | 89.999.814,00  | 89.316.607,00  | 99,24 |
|  |  | Penatausahaan Pembiayaan Daerah                                                                                                                                                             | 29.999.715,00  | 29.283.400,00  | 97,61 |
|  |  | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                   | 76.299.822,00  | 60.965.937,00  | 79,9  |
|  |  | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                          | 30.000.000,00  | 29.571.100,00  | 98,57 |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 167.290.000,00 | 165.045.453,00 | 98,65 |

|  |  |                                                                                                                                                                         |                  |                  |       |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|  |  | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas | 24.999.760,00    | 24.434.500,00    | 97,73 |
|  |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                      | 82.659.350,00    | 80.521.767,00    | 97,41 |
|  |  | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan           | 26.499.672,00    | 23.307.794,00    | 87,95 |
|  |  | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                              | 39.999.990,00    | 34.522.400,00    | 86,30 |
|  |  | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                               | 1.269.352.285,00 | 1.138.561.591,00 | 89,69 |
|  |  | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                  | 39.966.000,00    | 39.477.500,00    | 98,77 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|  |  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | 203.486.860,00 | 202.237.355,00 | 99,38 |
|  |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | 69.999.655,00  | 69.250.232,00  | 98,92 |
|  |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 79.999.780,00  | 79.850.961,00  | 99,81 |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 600.900.145,00 | 486.928.483,00 | 81,03 |
|  |  | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        | 99.999.815,00  | 97.226.600,00  | 97,22 |
|  |  | Penyusunan Analisis Laporan                                                                                                                                                                                                 | 114.999.820,00 | 109.803.187,00 | 95,48 |
|  |  | Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                                                         |                |                |       |

|            |                                                |                                                                                                     |                    |                    |       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
|            |                                                | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah     | 29.999.910,00      | 24.094.273,00      | 80,31 |
|            |                                                | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                   | 30.000.300,00      | 29.693.000,00      | 98,97 |
|            |                                                | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                      | 263.046.211.181,00 | 261.869.228.031,00 | 99,55 |
|            |                                                | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                | 255.879.125.932,00 | 255.674.829.617,00 | 99,92 |
|            |                                                | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                               | 5.566.200.849,00   | 4.774.506.614,00   | 85,77 |
|            |                                                | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                          | 1.600.884.400,00   | 1.419.891.800,00   | 88,69 |
|            |                                                | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b> | 351.600.000,00     | 196.800.000,00     | 55,97 |
|            |                                                | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah             | 351.600.000,00     | 196.800.000,00     | 55,97 |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b> | <b>Persentase Penatausahaan Aset</b>                                                                |                    |                    |       |
|            |                                                | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                              | 875.085.116,00     | 690.504.105,00     | 82,97 |

|  |  |                                                                                                         |                |                |       |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|  |  | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 64.999.580,00  | 57.450.100,00  | 88,38 |
|  |  | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | 74.999.589,00  | 71.291.508,00  | 95,05 |
|  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | 59.999.867,00  | 49.608.223,00  | 82,68 |
|  |  | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 24.999.680,00  | 24.501.937,00  | 98,00 |
|  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 87.999.490,00  | 42.670.474,00  | 48,48 |
|  |  | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 49.999.100,00  | 28.822.584,00  | 57,64 |
|  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 169.992.690,00 | 150.548.353,00 | 88,56 |
|  |  | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 107.099.270,00 | 85.305.430,00  | 79,65 |
|  |  | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 29.999.810,00  | 14.842.000,00  | 49,47 |
|  |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 69.999.720,00  | 42.673.000,00  | 60,96 |
|  |  | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 39.999.740,00  | 39.463.958,00  | 98,66 |
|  |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 49.999.980,00  | 41.268.511,00  | 82,53 |

|  |  |                                                                              |               |               |       |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
|  |  | Pembinaan Pengelolaan<br>Barang Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota | 44.996.600,00 | 42.058.027,00 | 93,46 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan dana tahun 2024 dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja sasarnya.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur kedepannya. Namun secara keseluruhannya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur telah berupaya melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Komitmen dan dedikasi yang kuat mulai dari unsur pimpinan sampai level staf dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan telah dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan.

Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi secara menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang masuk kelompok Indikator Kinerja besaran capaiannya rata-rata diatas 90 % dan sesuai dengan pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori Sangat Berhasil.
2. Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 secara menyeluruh pencapaian tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai 92,35% Kondisi kinerja keuangan tersebut, sesuai pedoman instrument standart pengukuran yang ditentukan, maka capaian kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 juga dapat dikatakan masuk kategori Berhasil.

#### **4.2 Saran**

Dari uraian capaian kinerja Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur serta perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan telah berupaya dengan baik. Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai faktor utama dalam perbaikan kinerja kedepan khususnya

yang bersifat internal. Namun untuk faktor penghambat yang bersifat eksternal akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi yang bersifat intens dan perlu ditempuh langkah-langkah konkrit sebagai upaya perubahan menuju perbaikan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggungjawaban akan keberhasilan maupun kegagalan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui laporan kinerja instansi pemerintah dapat pula diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi Kabupaten Flores Timur. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) unit Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini dibuat, sekiranya bermanfaat untuk semua pihak, terima kasih.

Larantuka, Januari 2025

Mengetahui  
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Flores Timur,



**Verdinandus F.A. Bolen, SE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197107132000121006